

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Keaslian Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pinjaman Luar Negeri.....	19
1. Gambaran Umum tentang Pinjaman Luar Negeri	19
2. Mekanisme Pengadaan Pinjaman Luar Negeri di Indonesia	22
3. Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dalam Perspektif Perbuatan Pemerintah pada Hukum Administrasi Negara	29
4. Risiko dan Konsekuensi dalam Penyelenggaraan Pinjaman Luar Negeri bagi Negara Peminjam.	32
B. <i>Tied Aid</i> (Pinjaman Mengikat).....	34
1. Gambaran Umum tentang <i>Tied Aid</i> pada Kegiatan Pinjaman Luar Negeri	34

2. Indikator Klasifikasi <i>Tied Aid</i> pada Kegiatan Pinjaman Luar Negeri	37
C. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	41
1. Gambaran Umum tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	41
2. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah yang Dibiayai oleh Pinjaman Luar Negeri.....	48
3. Dampak Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Melalui Efek Berganda (<i>Multiplier Effect</i>)	56
D. Infrastruktur	58
1. Gambaran Umum tentang Infrastruktur	58
2. Komponen Pembiayaan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur	61
E. Tingkat Komponen Dalam Negeri.....	63
1. Gambaran Umum tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri.....	63
2. Sejarah Hukum Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.....	66
F.Asian Development Bank.....	70
1. Gambaran Umum tentang Asian Development Bank	70
2. Kedudukan Indonesia dalam Keanggotaan Asian Development Bank	73
BAB III METODE PENELITIAN.....	76
A. Jenis dan Sifat Penelitian	76
B. Jenis Data.....	78
C. Alat dan Teknik Pengumpulan Data.....	84
D. Lokasi Penelitian	85
E. Analisis Data.....	85
F.Jalannya Penelitian	87
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	89
A. Perbandingan Ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Peraturan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah di Indonesia dengan Peraturan Pengadaan yang Dimiliki oleh Asian Development Bank.....	89
1. Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Peraturan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah di Indonesia.....	89

2.	Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Ketentuan Pengadaan yang Dimiliki oleh Asian Development Bank	101
3.	Tinjauan atas Perbandingan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Peraturan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah antara Indonesia dengan Asian Development Bank.....	107
B.	Identifikasi Langkah Pemerintah Menyikapi Kesenjangan Hukum dalam Aturan TKDN pada Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah yang Dibiayai oleh Asian Development Bank serta Kaitannya dengan <i>Tied Aid</i>	113
1.	Kedudukan Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Pinjaman Luar Negeri dengan Asian Development Bank	115
2.	<i>Tied Aid</i> pada Kegiatan Pengadaan Pinjaman Luar Negeri yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.....	117
3.	Langkah Pemerintah dalam Menegakkan Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri sebagai Upaya Mitigasi <i>Tied Aid</i> pada Perundingan Pinjaman Luar Negeri dengan Asian Development Bank.....	122
4.	Analisis Terhadap Langkah Mitigasi Risiko <i>Tied Aid</i> Pemerintah dan Aturan Pengadaan Asian Development Bank berdasarkan Indikator <i>Tied Aid</i> dalam Kegiatan Pengadaan Pinjaman Luar Negeri	128
C.	Tindak Lanjut dan Dampak dari Langkah Mitigasi Pemerintah Terhadap Potensi <i>Tied Aid</i> pada Kebijakan TKDN dalam kegiatan Pinjaman Luar Negeri dengan Asian Development Bank	133
1.	Tindak Lanjut Sikap Pemerintah dalam Perundingan Pinjaman Luar Negeri dengan Asian Development Bank	133
2.	Implikasi Sikap Pemerintah dan Kesepakatan antara Pemerintah dengan Asian Development Bank dalam Isu <i>Tied Aid</i> pada Pinjaman Luar Negeri pada Pelaku Usaha Dalam Negeri	136
BAB V PENUTUP		141
A.	Kesimpulan	141
B.	Saran	142
DAFTAR PUSTAKA		144
LAMPIRAN		160